

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan laporan mengenai strategi yang telah diimplementasikan dan dicapai secara sistematis serta terstruktur dalam suatu periode pelaporan guna memenuhi aspek akuntabilitas, manajemen, transparansi, serta keseimbangan antar generasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah, disusunlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Moenek & Suwanda, 2019). Laporan keuangan merupakan output akhir dari rangkaian proses akuntansi yang telah dilaksanakan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan dari berbagai unit organisasi di dalam pemerintahan daerah tersebut (Erlina & Rambe, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pemerintah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tujuan utama penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyediakan informasi yang signifikan mengenai kondisi keuangan serta seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu entitas pelaporan selama periode tertentu. Laporan keuangan mencerminkan sejauh mana kinerja pemerintah daerah telah dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, anggota parlemen, lembaga pengawas, auditor, investor, pemberi pinjaman dan donatur, serta pihak-pihak terkait dalam kebijakan dan investasi pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berkualitas baik, laporan tersebut harus memenuhi empat kriteria utama, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami (Erlina & Rambe, 2015). Faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan mencakup kompetensi aparatur pemerintah, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, serta pengendalian

internal. Dalam lingkungan pemerintahan, kurangnya pemahaman pegawai terhadap standar penyusunan laporan keuangan pemerintah dapat menyebabkan laporan tersebut tidak mencapai standar yang telah ditetapkan (Indrayani & Widiastuti, 2020). Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah (Puspita, Fadli, & Halimatusyadiah, 2020). Hal ini dikarenakan aparatur pemerintah bertanggung jawab dalam mencatat, mengolah, serta menyajikan data keuangan. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai standar akuntansi yang berlaku, prosedur pelaporan keuangan, serta kemampuan analitis yang baik untuk menyajikan informasi keuangan dengan akurat dan tepat. Dengan kompetensi yang memadai, pegawai pemerintah dapat mengelola data keuangan secara efisien, mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian, serta menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki peranan penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam pengelolaan data keuangan. Penerapan SAKD merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut (Erlina & Rambe, 2015), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem yang mencakup proses pencatatan, klasifikasi, interpretasi, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Input dalam sistem akuntansi keuangan daerah mencakup buku memorial, Surat Tanda Setoran, atau Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), sedangkan output-nya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) (Indrayani & Widiastuti, 2020). Jika penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan secara optimal, maka kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan semakin meningkat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun sesuai dengan pedoman Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. SPI berperan penting dalam memverifikasi efektivitas dan efisiensi proses akuntansi, meningkatkan kredibilitas serta objektivitas informasi, serta memfasilitasi proses audit terhadap laporan keuangan. Kurangnya deteksi terhadap kecurangan akuntansi dapat menghasilkan bukti audit yang tidak relevan akibat lemahnya pengendalian internal. Penilaian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap hasil audit atau pemeriksaan laporan keuangan pemerintah setiap periode mencerminkan standar kualitas dalam penyajian serta pengelolaan laporan keuangan tersebut. Opini yang diberikan dapat berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Opini tersebut menggambarkan sejauh mana laporan keuangan telah memenuhi standar pelaporan yang berlaku serta menunjukkan tingkat keandalan informasi keuangan yang disajikan.

Banyak pemerintah daerah yang berhasil memperoleh opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa laporan keuangannya telah memenuhi standar pelaporan keuangan yang baik (Indrayani & Widiastuti, 2020). Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses penyusunan laporan keuangan mereka, dengan fokus pada peningkatan kualitas serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Tabel 1. 1 Opini LKPD Kota Denpasar Tahun 2018-2022

Entitas Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Denpasar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester I Tahun 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Kota Denpasar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini mengartikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar memiliki kualitas laporan keuangan yang baik dikarenakan dapat mempertahankan opini WTP. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas

dari kesalahan material, BPK melakukan pengujian terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berpengaruh langsung pada laporan keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 76A/LHP/XIX.DPS/05/2023 yang dilakukan oleh BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan LKPD tahun 2022 Kota Denpasar. Pokok-pokok temuan tersebut yaitu 1) Kesalahan dalam penganggaran atas belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga serta kesalahan penggunaan rekening belanja pada akun belanja barang dan jasa. 2) Pengelolaan piutang pajak daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hasil pemeriksaan diketahui Pemerintah Denpasar belum melakukan verifikasi dan validasi atas piutang pajak hotel, restoran, dan hiburan yang macet sebesar Rp 2.855.431.684,20, Rp 1.593.658.368,50, dan Rp 1.104.966.460,91 berpotensi tidak tertagih. 3) Persediaan atas barang yang disahkan kepada Masyarakat belum dilakukan penyerahan. Hasil pemeriksaan atas persediaan pada Dinas PUPR diketahui terdapat persediaan untuk diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 23.488.742.998,00, diantaranya terdapat persediaan berupa penataan kawasan pasar Kumbasari yang akan dilakukan penyertaan modal ke Perumda pasar Sewakardama. Hal tersebut mengakibatkan persediaan tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Dari beberapa kesalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPD memperoleh opini WTP, Pencatatan laporan keuangan tidak luput dari kesalahan.

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas terkait kompetensi aparatur, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Barus, Harmain, & Tambunan, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang” menghasilkan bahwa Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara parsial berpengaruh signifikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Pengendalian Internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Desa Kecamatan Besitang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunisa & Ahmad, 2021) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember” menghasilkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi SDM dan SPI berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan oleh (Binawati & Nindyaningsih, 2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten)” menghasilkan bahwa Penerapan SAKD, Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap laporan kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar?

2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kota Denpasar?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar?
4. Apakah Kompetensi Aparatur, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
2. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar.
4. Untuk menganalisis secara simultan pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian maka dapat dirumuskan bahwa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat memberikan sarana pengimplementasian teori-teori atau materi yang diperoleh selama proses pembelajaran perkuliahan serta mengukur sejauh mana Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar, mengembangkan pemikiran yang kritis, dan meningkatkan kemampuan analisis.

2. Bagi Akademis

Dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar bagi para akademis dan sebagai salah satu sumber referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai topik penelitian yang sama.

3. Bagi Intansi

Dapat memberikan masukan atau saran kepada pemerintah dalam mengoptimalkan Kompetensi Aparatur, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang lebih efektif.